

DI BAWAH RERATA NASIONAL DAN PROVINSI

Wilayah Dilibatkan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

YOGYA (KR) - Aparatur wilayah terutama kelurahan dan kemandren di Kota Yogya semakin dilibatkan secara aktif untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Terutama sebagai tim penanggulangan kemiskinan (penangkis) yang berhadapan langsung dengan warga sasaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya Ir Aman Yuridijaya MM, mengatakan Pemkot memiliki komitmen kuat dalam mengentaskan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS Tahun 2022, angka kemiskinan di Kota Yogya sebesar 6,62 atau lebih rendah jika dibandingkan angka kemiskinan DIY sebesar 11,34 maupun angka kemiskinan Nasional yaitu 9,54. Dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat kemiskinan Kota Yogya juga mengalami penurunan sebesar 1,07 dari angka kemiskinan tahun 2021.

"Pada tahun 2021 puncak pandemi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan mencapai 7,69 dan di tahun

2022 dimana kondisi sudah membaik angka kemiskinan turun. Meski mengalami penurunan, tentu Pemerintah Kota Yogya tidak ingin berhenti pada pencapaian-pencapaian yang sudah ada. Ada hal yang lebih penting yaitu adalah bagaimana kemudian kita semuanya berkomitmen menanggulangi kemiskinan di Kota Yogya salah satunya dengan melakukan Pensasaran Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," ujar Aman, Jumat (31/3).

Aman menyebutkan strategi penanggulangan kemiskinan Kota Yogya berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Pasal 17 yaitu peningkatan ke-

mampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan kesempatan dan peluang kerja atau magang. Selain itu juga pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro kecil dengan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis UMKM, Forum UMKM serta kegiatan gelar UMKM.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Agus Tri Harsono, menjelaskan berdasarkan Keputusan Walikota Yogya Nomor 479 Tahun 2022 tentang Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogya Tahun 2022 terdapat 49.121 jiwa yang menjadi sasaran. Data tersebut merupakan hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Yogya. "Setelah dilakukan overlay dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Ekstrem (P3KE), diperoleh data sasaran kemiskinan ekstrem sebanyak 13.151 jiwa. Agar program ini da-

pat maksimal dan tepat sasaran maka dibentuk struktur organisasi tim penangkis kemandren dan

kelurahan dengan Mantri Pamong Praja sebagai ketua penangkis," jelasnya. (Dhi)-f

Optimalisasi MCP Harus Berjalan Baik

YOGYA (KR) - Penggunaan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai upaya KPK RI melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di pemerintah daerah akan semakin dimaksimalkan. Untuk itu, Pemda DIY berharap optimalisasi MCP ini bisa berjalan semakin baik dari tahun sebelumnya.

"Langkah pencegahan korupsi ini dilakukan tidak hanya sekadar pemenuhan administrasi, tapi juga dapat diimplementasikan dalam rutinitas penyelenggaraan pemerintah di DIY. Jadi saya berharap para OPD pengampu indikator pada MCP, saya harapkan bisa berdiskusi di kesempatan ini," kata Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Wiyos Santoso dalam Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pencegahan Korupsi bersama KPK RI di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Jumat (31/3).

Dikatakan, Pemda DIY berharap bisa melakukan percepatan capaian MCP, yang tentunya hal tersebut juga sangat bermanfaat untuk DIY sendiri. Mengenai penjelasan teknis serta diskusi hal-hal yang terkait dengan area intervensi MCP KPK tahun 2023. Untuk itu pihaknya menyarankan OPD-OPD terkait bisa mengikutinya dengan baik.

"Kegiatan ini menjadi kesempatan untuk berdiskusi terkait dengan indikator dan sub-indikator MCP, sehingga kita memiliki pemahaman yang sama dan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Mungkin juga masih ada permasalahan yang lama, nanti kita harapkan ada solusi," imbuhnya.

Sebagai informasi, MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikem-

bangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. MCP memiliki delapan cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Direktorat Wilayah III Kedeputusan Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK RI, Uding Juharudin mengungkapkan, pada dasarnya MCP bukanlah barang baru. Dimana pada MCP 2023, terdapat 30 indikator dan 63 sub-indikator yang menjadi unsur penilaian dalam capaian atas upaya pencegahan korupsi.

"Penilaian MCP 2023 dilakukan secara bersama-sama oleh KPK RI, BPKP RI, dan Kemendagri RI. Area intervensi, indikator dan sub-indikator ditetapkan melalui SK Pimpinan KPK RI. Upaya pencegahan korupsi ini memang harus dilakukan secara berkesinambungan dan sistemik," paparnya. Uding menuturkan, MCP ke depannya akan bertindak sebagai tools, guna mewujudkan pemerintahan, baik pusat maupun daerah yang bersih, transparan dan akuntabel. Dengan begitu, tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat bisa tercapai.

"Capaian MCP Pemda DIY tahun sebelumnya dapat dikatakan sudah cukup tinggi yakni di angka 94,23," imbuhnya. (Ria)-f

TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN MUSTAHIK

Baznas DIY Bantu Cleaning Service



Plt Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Setda DIY, Aris Eko Nugroho, secara simbolis menyerahkan bantuan logistik lansia seumur hidup.

YOGYA (KR) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DIY terus menyalurkan bantuan untuk mereka yang membutuhkan. Antara lain bantuan logistik untuk para tenaga kerja honorer, cleaning service, security, dan tenaga bantu lainnya di lingkungan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas DIY.

Secara simbolis bantuan diserahkan Plt Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Setda DIY, Aris Eko Nugroho SP MSi mewakili Plt Sekda Wiyos Santoso, didampingi Ketua Baznas DIY Dra Hj Puji Astuti di Bangsal Wiyoto Projo Kepatihan Yogyakarta, Jumat (31/3). Acara dihadiri

Kakanwil Kemenag DIY Dr H Masmin Afif MAg, Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY serta perwakilan dari OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) Pemda DIY. Pada kesempatan ini juga secara simbolis diserahkan bantuan logistik lansia seumur hidup dan Paket Ramadan Bahagia.

"Sebanyak dua ribu lima ratus paket yang kami tawarkan untuk para security, cleaning service, dan tenaga bantu lainnya, semoga dapat mengurangi beban ekonomi mereka, terutama di bulan Ramadan yang biasanya harga-harga barang semakin naik", lanjut Tuti. Pendistribusian logistik

ini merupakan bagian dari upaya Baznas DIY meningkatkan kualitas pelayanan mustahik dan pemenuhan kebutuhan logistik dalam berbagai kegiatan Baznas DIY seperti saat ini. Melalui persiapan yang matang dan bekerja sama dengan berbagai pihak salah satunya adalah UKM binaan UPZ Baznas DIY.

"Kami pastikan, pada setiap tahap pendistribusian berjalan dengan baik. Logistik berupa beras, gula kelapa, minyak goreng dan sejenisnya kami pesankan pada UKM. Harapannya, dapat membantu dalam putaran ekonomi mereka", kata Puji Astuti.

Dalam proses pendistribusian logistik ini, Baznas DIY juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti UPZ yang berada di lingkungan Pemda DIY dan instansi vertikal di DIY, sebagai pemberi data mustahik.

Plt Sekda DIY Wiyos Santoso dalam sambutan yang dibacakan Plt Asisten Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Aris Eko Nugroho mengapresiasi semua yang dilakukan Baznas DIY ini. Juga berharap sinergi antara Baznas DIY dengan Pemda DIY ditingkatkan. (Fie)-f

DPRD KOTA YOGYAKARTA

SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

JAMIN VALIDITAS PEMILIH PEMILU 2024

Coklit Selesai, Sinkronisasi Data KPU-Dindukcapil

YOGYA (KR) - KPU Kota Yogya yang dibantu oleh petugas Pantarlih sudah menyelesaikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih Pemilu 2024. Sembari melanjutkan proses tahapan, sinkronisasi data hasil coklit milik KPU Kota Yogya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) harus mampu diwujudkan secara berkesinambungan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogya yang duduk di Komisi A, Yustinus Kelik Mulyono, menjelaskan sinkronisasi data antara KPU dengan Dindukcapil tidak bisa dipandang sebelah mata. "Ini justru yang akan menjamin validitas data pemilih Pemilu 2024. Jangan sampai ada warga yang sudah memiliki hak pilih namun belum masuk dalam data pemilih. Sebaliknya, warga yang sudah meninggal dunia juga jangan tetap masih tercatat," urainya.

Kelik menilai, Dindukcapil setiap saat memberikan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi masyarakat tanpa dibatasi waktu. Sehingga jika ada warga yang pindah datang maupun mutasi ke luar daerah, meninggal dunia bahkan bayi yang baru dilahirkan, akan tercatat dengan baik dalam sistem adminduk.

YUSTINUS KELIK MULYONO
Fraksi
PDI Perjuangan

KR-Istimewa

Oleh karena itu data kependudukan tersebut bersifat aktual maupun faktual sepanjang setiap kejadian langsung dilaporkan. Berbeda dengan tahapan Pemilu 2024, terutama dalam proses penetapan data pemilih yang kegiatan dan pelayanannya dibatasi oleh waktu. Hal itu tidak menutup ke-

mungkinan ada potensi masalah seperti warga yang berhak memilih namun belum masuk daftar, data ganda dan lain sebagainya. "Makanya sinkronisasi data ini agar di kemudian hari tidak menjadi masalah. Dindukcapil ini kan prosesnya berjalan terus. Data bisa berubah-ubah. Harapan kita itu terpantau terus dengan adanya sinkronisasi sehingga nanti di menit terakhir tidak jadi masalah," paparnya.

Di sisi lain, Kelik berharap ada proses sosialisasi yang berkesinambungan di masyarakat. Terutama terhadap warga yang lanjut usia karena perlu mendapatkan penjelasan secara detail. Berbeda dengan anak muda yang mampu dengan sendirinya mencari informasi. Harapan itu berkaitan pengalamannya yang sedikit gaduh pada saat coklit. Pasalnya dalam satu rumah yang diisi oleh dua KK dengan alamat yang sama namun lokasi TPS berbeda. "Memang dijelaskan jumlah pemilih dalam satu TPS maksimal 300 orang. Tapi jika penjelasannya tidak detail bisa membingungkan bagi yang tua-tua. Padahal kan jelas-jelas satu rumah tapi TPS beda. Aksesnya harus diperhatikan," tandasnya. (Dhi)-f

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

Jl. Solo Km.6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172, Fax. (0274) 489552
<http://sda.pu.go.id/balai/bwsserayuopak>

PENGUMUMAN

PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI (P3-TGAI) TAHUN ANGGARAN 2023

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) adalah program padat karya tunai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan dana APBN. Pelaksanaan P3-TGAI dilakukan sesuai Pedoman dan Petunjuk sebagai berikut:

- Kegiatan P3-TGAI dilaksanakan sendiri oleh P3A/GP3A/IP3A atau dengan nama lain secara SWAKELOLA ATAU TIDAK DIPIHAK KETIGAKAN/ DIKONTRAKTUALKAN** pada kegiatan rehabilitasi, peningkatan, dan/pembangunan jaringan irigasi.
- Menghimbau kepada masyarakat agar **berhati-hati dan mewaspadaai aksi penipuan dengan modus Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan P3-TGAI (Pihak ke-3)** yang dilaksanakan pihak-pihak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air maupun BBWS/BWS

Demikian disampaikan untuk dapat menjadikan perhatian

Yogyakarta, 29 Maret 2023
Kepala
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
Ttd
Dr. Dwi Purwantoro, ST, MT
NIP. 19740909 2001121 002